

HUBUNGAN YUNANI DAN UNI EROPA PASCA KRISIS YUNANI TAHUN 2010

Kensy Dewi Asmiantyningsih

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

E-mail: kensydewi11@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how is relationship between Greece and European Union after Greece crisis in 2010. The research method used by the author in this research is descriptive method of qualitative analysis. The data has been collected through library research, online data search, and interviews. Data then analyzed with theories that related to International Relations. When Greece has a crisis in 2010, European Union provided loan assistance to Greece government. The loan is carried out through agreement of the Greece Government and European Union through economic assistance programs on the condition that Greece has to create austerity policies that regulated by European Union. This is already put Greece in a circle of bailout-austerity since 2010 until 2018. It also led to the emergence of Grexit or Greece Exit from the European Union membership.

Keywords: Greece, European Union, Greece Crisis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca terjadinya krisis Yunani tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka, penelusuran data *online*, dan wawancara. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan dengan Hubungan Internasional. Ketika Yunani mengalami krisis pada tahun 2010, Uni Eropa memberikan bantuan dana pinjaman kepada Yunani. Bantuan tersebut diberikan dengan kesepakatan Pemerintah Yunani dan Uni Eropa melalui program-program bantuan ekonomi dengan syarat Yunani harus melakukan kebijakan penghematan yang diatur oleh Uni Eropa. Hal ini menempatkan Yunani pada siklus *bailout-austerity* sejak tahun 2010 hingga 2018. Hal ini juga kemudian mengakibatkan munculnya desakan *Grexit* atau *Greece Exit* dari keanggotaan Uni Eropa.

Kata Kunci : Yunani, Uni Eropa, Krisis Yunani

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara adalah salah satu tolak ukur dalam menilai perekonomian sebuah negara, begitu pun dengan perbandingan antara jumlah hutang negara dan pendapatannya. Tidak sedikit negara yang berujung miskin bahkan menjadi negara gagal. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran itu terjadi adalah ketidakmampuan negara dalam mengelola keuangannya dengan baik dan terjebak dalam masalah hutang negara (Sungkono, 2007 : 25).

Pada praktiknya negara-negara pada umumnya memang memiliki hutang luar negeri. Dana dari hutang tersebut lazimnya digunakan untuk investasi jangka panjang demi kesejahteraan warganya, baik pada sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sumber daya, kesehatan, dan lain sebagainya (Junaedi, 2018 : 565). Negara sebesar Amerika Serikat pun termasuk salah satu negara dengan hutang terbesar. Namun dengan perekonomian yang besar juga Amerika tetap dalam kondisi aman terkait pembayaran hutangnya (<https://id.tradingeconomics.com/country-list/external-debt> diakses pada 15 Maret 2019).

Suatu negara akan bermasalah dalam hutang jika besar hutangnya melebihi pendapatan negara tersebut. Hal inilah yang terjadi pada Yunani. Yunani adalah salah satu negara yang mengalami masalah besar dalam hutang. Krisis hutang yang terjadi pada Yunani dalam 1 dekade terakhir telah menjadi suatu isu global dan menarik perhatian masyarakat internasional. Nama Yunani seolah identik dengan kebangkrutan (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

Akar permasalahan krisis Yunani adalah manajemen keuangan negara yang

defisit dan hutang negara yang terus-menerus menumpuk sehingga rasionya melebihi GDP (*Gross Domestic Bruto*). Dalam perkembangannya, Yunani mengajukan permohonan bantuan dana pada Troika hingga tiga kali karena krisis yang sangat merugikan ini, yaitu pada tahun 2010, 2012, dan 2015. Sejak tahun 2016, perekonomian Yunani mengalami peningkatan secara perlahan, meskipun pada waktu tertentu kembali fluktuatif. Krisis ekonomi tentu merupakan suatu hal yang sangat besar, dapat mempengaruhi hubungan antara Yunani dengan negara lainnya, terutama dalam keberadaan Yunani sebagai salah satu negara Uni Eropa. Yunani yang masuk dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 1981 memiliki cerita tersendiri (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 22 Maret 2019).

Keputusan Yunani untuk bergabung dalam Uni Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, tetapi Yunani mengalami hambatan dalam beradaptasi dengan persaingan pasar Eropa yang sudah lebih maju dan mapan. Pada praktiknya, harapan untuk dapat meningkatkan perekonomian negara seketika runtuh saat krisis global terjadi di tahun 2008. Pada saat itu semua negara di Eropa terkena dampaknya, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang memiliki hutang sangat banyak, Yunani merasakan dampak yang paling besar (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani> diakses pada 30 Maret 2019).

Secara historis, Yunani adalah negara yang tidak memenuhi kualifikasi saat mendaftar pada Uni Eropa karena angka inflasi, defisit, dan hutang Yunani yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah melakukan upaya perbaikan hingga pada

tahun 1981 Yunani secara resmi dapat bergabung dalam Uni Eropa dan *Eurozone* pada tahun 2001. Namun, pada akhirnya muncul fakta bahwa data-data ekonomi yang membuat Yunani tergabung menjadi bagian dari *Eurozone* ternyata merupakan hasil rekayasa.

Yunani pada masa pengajuannya dalam Uni Eropa memiliki indeks korupsi yang sangat tinggi, manajemen keuangan yang boros, serta pertumbuhan ekonomi yang lemah. Hal ini membuat Yunani memiliki perekonomian yang belum sejajar dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, sehingga penyeragaman mata uang *Euro* memberikan beban yang sangat besar bagi Yunani. Puncaknya saat dunia dilanda krisis pada tahun 2008, Yunani sangat terpuruk karena terlilit hutang yang melebihi GDP. Dalam situasi ini, Uni Eropa sebagai integrasi negara yang terdiri dari Yunani di dalamnya tentu akan terkena dampak pula dari terpuruknya Yunani di masa krisis (Simanjuntak & Wijanarka, 2016 : 20-21).

Krisis ini telah memberikan dampak secara eksternal dengan melemahkan stabilitas ekonomi di Uni Eropa, dan dampak secara internal dengan membebankan masyarakat pada *austerity* yang mengarah pada desakan meminta Yunani keluar dari Uni Eropa. Namun Yunani seolah tidak punya pilihan lain selain berada dalam kendali Uni Eropa dan Uni Eropa pun atas berbagai pertimbangan terus membantu dan mempertahankan Yunani.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengangkat pertanyaan rumusan masalah mayor untuk membatasi penelitian, yaitu:

“Bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani tahun 2010?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian dikembangkan menjadi beberapa rumusan masalah minor sebagai berikut:

1. Bagaimana stabilitas ekonomi Uni Eropa pasca krisis Yunani?
2. Bagaimana krisis Yunani mempengaruhi munculnya desakan *Greece Exit* (Grexit) dari Uni Eropa?
3. Mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan Yunani sebagai anggota Uni Eropa?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah dalam tema dan waktu. Penelitian akan berfokus pada lingkup tema terkait krisis hutang Yunani, Uni Eropa, dinamika yang terjadi selama masa krisis, serta hubungan antara keduanya. Sedangkan pembatasan waktu yaitu tahun 2010 hingga 2018 dengan alasan tahun 2010 adalah titik awal krisis Yunani, hingga tahun 2018 dengan asumsi diharapkan dapat menjadi batas analisis waktu terkini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani terjadi sejak tahun 2010.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui stabilitas ekonomi Uni Eropa pasca krisis Yunani
2. Mengetahui bagaimana krisis Yunani mempengaruhi munculnya desakan *Greece Exit* (Grexit) dari Uni Eropa
3. Mengetahui mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan Yunani di Uni Eropa

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penerapan dari beberapa teori yang sudah peneliti pelajari, yaitu teori tentang hubungan internasional, organisasi internasional, ekonomi politik internasional, serta krisis ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan keilmuan bagi peneliti, memberikan referensi bagi pembaca, dapat dijadikan pembandingan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau topik yang berkaitan, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi studi ilmu hubungan internasional.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah segala interaksi aktor hubungan internasional yang melewati lintas-batas negara. Ini merupakan satu upaya yang harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, karena dinamika politik internasional terus berkembang dan masalah antarnegara pun semakin menggiring negara pada suatu bentuk ketergantungan satu sama lain. Hubungan atau interaksi antarnegara pun mengalami perkembangan sehingga aktor hubungan internasional tidak hanya negara (*state actor*), tetapi juga aktor bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

2.1.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi

internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. (Perwita & Yani, 2014:91). Organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melewati lintas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas untuk mencapai tujuan bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009:3).

2.1.3 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk dana maupun barang. Bantuan ini secara umum tidak diperuntukan hanya untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemberian bantuan dapat dilakukan antarpemerintah (*government to government*) maupun melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank (Ikbar, 2007 : 188).

2.1.4 Regionalisme

Kawasan atau regional adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kecenderungan kesamaan geografis, bahasa, etnis, budaya, sejarah, sosial, dan identitas (Perwita & Yani, 2014:104). Regionalisme berkembang dari kesadaran negara-negara dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama. Pemikiran ini kemudian mengarah pada kemungkinan membentuk suatu organisasi regional yang berisi kerjasama regional. (Perwita & Yani, 2014:110).

2.1.5 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam ruang lingkup internasional. (Perwita & Yani, 2014:75).

Dalam arti yang lebih luas, ekonomi politik internasional didefinisikan sebagai studi tentang saling keterkaitan antara interaksi fenomena ekonomi dan politik, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mas’oed, 2003 : 4). Sehingga ekonomi politik merupakan hasil interaksi antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah sebagai unsur politik yang satu sama lain saling beririsan.

2.1.6 Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah suatu keadaan global maupun pada suatu negara, mengalami keruntuhan atau penurunan pada seluruh sektor ekonomi. Sederhananya krisis ekonomi adalah keadaan dimana sebuah negara mengalami masalah finansial yang sangat berat sehingga rakyat tidak lagi percaya dan mendukung pemerintah. Lebih jauh rakyat kemudian enggan menyimpan uangnya di bank sehingga bank mengalami kesulitan uang tunai. Jika hal itu terjadi, maka bank sentral akan mencairkan asetnya untuk menalangi semua bank itu. Setelah itu maka harga-harga akan naik seiring dengan banyaknya uang tunai di masyarakat (Ikbar, 2007 : 21).

2.2 Kerangka Pemikiran

Krisis ekonomi yang terjadi di Yunani dalam 1 dekade ini adalah suatu fenomena global yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu isu yang sangat besar pada lingkup internasional. Secara mendasar fenomena ini dapat diamati dengan mengacu pada teori maupun konsep hubungan internasional. Hal ini karena apa yang terjadi pada Yunani secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak bagi dunia internasional serta melibatkan

beberapa aktor HI lain, baik aktor negara maupun non-negara.

Bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, dapat disimpulkan bahwa Yunani melakukan peminjaman dana kepada Bank Sentral Eropa untuk mengantisipasi krisis ini berkepanjangan. Krisis ini pada perkembangannya mempengaruhi hampir seluruh negara-negara *eurozone*. Krisis ini berawal dari masalah hutang pemerintah Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis ini. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara *Eurozone*.

Setelah berbagai upaya negosiasi, Yunani mendapatkan beberapa kali pinjaman luar negeri dari kreditor Troika dengan bunga dan jangka waktu yang ditentukan, namun dengan syarat pencairan dana yaitu Yunani harus menerapkan beberapa kebijakan khusus yang diminta kreditor Troika pada negaranya. Pemerintah menyetujui dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru bagi warganya, yaitu kebijakan yang berkonsep untuk penghematan dan pemotongan anggaran rutin tertentu, serta kebijakan batas transaksi pada perbankan.

Pada lingkup ini, Yunani mengalami krisis yang jelas merupakan suatu masalah ekonomi, lalu dalam upaya penyelesaiannya Yunani diharuskan untuk menyetujui syarat-syarat politik tertentu dari pihak yang memberikan bantuan pinjaman, serta harus menerapkan kebijakan politik yang baru di negaranya. Bahkan dalam urusan politik dalam negeri pun, pemerintah mengalami masalah internal yang semakin meningkatkan protes anti-pemerintah dan memperburuk keadaan negara.

Selama krisis terjadi, tentu Yunani mengalami ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dihadapkan pada tenggang waktu

pembayaran hutang luar negeri dan bunganya, lalu keuangan perbankan yang bermasalah, serta menangani masalah ekonomi dalam negeri yang terus meluas. Dalam upaya menyelesaikan masalah krisis yang terjadi, Yunani yang merupakan anggota dari Uni Eropa tentu melakukan upaya terdekat dengan memohon bantuan pada Uni Eropa sebagai tempat bernaung selama ini. Sementara Uni Eropa yang merupakan sebuah konsep dari integrasi terdiri atas beberapa negara di dalamnya, sehingga ketika ada suatu hal buruk yang menimpa salah satu negara, maka tentu akan berdampak pada integrasi tersebut.

Dalam perkembangannya permasalahan ini kemudian meluas hingga memunculkan isu *Grexit* atau mengeluarkan Yunani dari Uni Eropa, karena desakan dari masyarakat Yunani yang merasa sangat dirugikan dan memiliki kehidupan yang berubah drastis setelah pemerintah banyak menerapkan *austerity* yang menyulitkan masyarakat. Namun Uni Eropa terus membantu Yunani dengan memberikan 3 kali *bailout* bahkan melakukan negosiasi antar anggota Uni Eropa terkait isu *Grexit* ini.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang dipakai peneliti adalah metode pendekatan kualitatif, Metode ini dipilih peneliti karena dapat menghasilkan prosedur analisis dan deskriptif, sehingga dapat mengetahui gambaran umum mengenai fenomena, dan konkrit terkait krisis hutang Yunani, pengaruhnya terhadap kawasan Eropa, kemudian kebijakan yang dilakukan Uni Eropa dalam upaya membantu menyelesaikan krisis tersebut, dinamika perdebatan keluarnya Yunani dari Uni Eropa, serta bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis tersebut.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dari buku, jurnal, laporan penelitian, berita dan website resmi, ditunjang dengan wawancara sesuai dengan informan penelitian sebagai bentuk analisis data komprehensif terkait krisis hutang Yunani serta hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis tersebut.

3.2.1 Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai salah satu metode analisis kasus yang diangkat peneliti melalui analisis pustaka buku-buku referensi, jurnal, laporan, artikel dan media lain yang berkaitan dengan krisis Yunani dan Uni Eropa.

3.2.2 Wawancara

Selain memperoleh data dari studi pustaka, peneliti juga akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada narasumber yang relevan. Peneliti melakukan studi lapangan melalui metode wawancara sebagai bentuk verifikasi dalam pengumpulan data yang telah ditentukan, yaitu pada narasumber dari Kantor Kedutaan Yunani untuk Indonesia yang dapat memberikan data atau informasi terkait krisis Yunani dan pengaruhnya secara internal maupun eksternal serta hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis tersebut.

3.3 Uji Keabsahan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah dikumpulkan baik dari studi pustaka maupun wawancara. Peneliti juga melakukan triangulasi data atau pengujian dengan membandingkan berbagai sumber lalu dijadikan referensi, dan melakukan seluruh rangkaian penelitian dengan mendiskusikan pada dosen pembimbing.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu teknik reduksi data. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan kemudian direduksi atau dirangkum dan dipilih yang dapat dijadikan pembahasan untuk menjawab seluruh rumusan masalah kemudian diuraikan menjadi satu laporan tertulis. Data yang diperoleh melalui wawancara dan triangulasi sumber yang digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian yang megacu pada panduan teori. Hal ini juga bertujuan agar data yang digunakan berkorelasi dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti menyajikan data dari hasil penelitian dan wawancara serta sumber-sumber media yang kredibel sesuai kebutuhan yang pada akhirnya peneliti dapat mengerucutkan dalam suatu kesimpulan penelitian.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Yunani

Yunani (*Greece*) atau disebut juga *Hellenic Republic* adalah sebuah negara dengan ibukota Athena, terletak di benua Eropa khususnya di semenanjung Balkan. Secara astronomis Yunani terletak diantara 34°-42° LU dan 19°-30° BT, sementara secara geografis berbatasan dengan Albania, Bulgaria, Makedonia, dan Turki Yunani memiliki luas wilayah sebesar 131.957 km² dengan populasi penduduk sekitar 10 juta (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 14 Juni 2019).

4.1.1.1 Perekonomian Yunani

Perekonomian Yunani secara garis besar disokong oleh sektor utama yaitu pariwisata, kemudian perkapalan, industri makanan, tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan, dan perminyakan. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat

diunggulkan. Dengan angka turis pendatang yang sangat tinggi, hal ini membuat sektor pariwisata, hotel dan penginapan, wirausaha, administrasi publik, serta telekomunikasi juga sangat tinggi. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa pariwisata Yunani menyumbang hampir 80% GDP. Dalam satu tahun, diperkirakan sekitar 15 juta wisatawan internasional datang ke Yunani. Hal ini menjadikan Yunani sebagai negara peringkat ke-7 yang paling banyak dikunjungi di Uni Eropa dan peringkat ke-16 di dunia.

Yunani memiliki pertumbuhan PDB rata-rata sejak tahun 1990-an yang terbilang tinggi. Namun, Yunani juga menghadapi persoalan ekonomi yang besar, yaitu tingginya angka pengangguran, lemahnya birokrasi, hambatan pendapatan dari pajak, dan alokasi anggaran yang boros. Yunani memiliki hutang yang tinggi namun dengan pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan negara Uni Eropa lainnya (https://www.indexmundi.com/greece/economy_overview.html diakses pada 9 Agustus 2019).

4.1.1.2 Keanggotaan Yunani di Uni Eropa

Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981. Setelah tergabung dalam Uni Eropa, seluruh kebijakan ekonomi dan politik Yunani akan bersinggungan dengan kehidupan ekonomi dan politik kawasan, terutama dalam hal ekonomi sejak Yunani bergabung dalam *Eurozone* pada tahun 2001. Yunani menggunakan *euro* menggantikan *drachma*, mata uang sebelumnya (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 16 Juni 2019).

4.1.2 Tinjauan Umum Uni Eropa

Uni Eropa terbentuk atas sejarah panjang sejak tahun 1950 yang telah melewati berbagai proses dan perjanjian. Sejarah ini dimulai dari proposal Prancis

yang dikenal dengan *Schuman Plan*, berisi pengaturan membentuk pasar bersama batu bara dan besi baja yang beranggotakan Prancis, Belanda, Italia, Jerman, Belgia, dan Luksemburg (https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en diakses pada 11 Juni 2019).

Kerangka ini kemudian berkembang menjadi *European Coal and Steel Community*. Pasar bersama yang sudah terbentuk kemudian dikembangkan tidak hanya pada sektor batu bara dan besi, tetapi di seluruh sektor ekonomi hingga akhirnya dikembangkan menjadi *European Atomic Energy Community* dan *European Economic Community*. Integrasi ini mengimplementasikan harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional dalam 4 *Freedom of Movement* yaitu kebebasan transaksi perdagangan dalam hal barang, jasa, pekerja, dan modal (Perwita & Yani, 2014 : 111).

Integrasi ini terus mengalami perkembangan hingga akhirnya menjadi *European Community*, yang merupakan integrasi ekonomi dengan lingkup yang sangat luas pasca dibentuknya *Schengen Agreement* atau integrasi geografis negara-negara anggota dengan penghapusan pemeriksaan di perbatasan negara-negara anggota. Setelah disetujui dan diterapkan dengan mengacu pada target bersama, pada tanggal 7 Februari 1992 ditandatangani *Maastricht Treaty* atau *Treaty on European Union* di Maastricht yang secara resmi memberlakukan Pasar Tunggal Eropa, berlaku sejak 1 November 1993 (Perwita & Yani, 2014:111).

Traktat Maastricht ini menjadi dasar yang sangat kuat dengan merubah *European Community* menjadi *European Union* atau Uni Eropa. Uni Eropa terdiri atas 3 pilar, yaitu:

1. Ekonomi – *Economic and Monetary Union*

2. Politik – *Common Foreign and Security Policy*
3. Masalah dalam Negeri dan Hukum – *Justice and Home Affairs*

4.1.2.1 Keanggotaan Uni Eropa

Saat ini tercatat ada 28 anggota Uni Eropa, yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Irlandia, Inggris, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovakia, Bulgaria, Rumania, dan Kroasia. Dari seluruh anggota Uni Eropa, tidak seluruhnya menggunakan mata uang *euro* sebagai mata uang negaranya. Ada 19 negara yang menggunakan *euro* sebagai mata uang negaranya, disebut juga sebagai *Euro zone*, yaitu Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol (https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_en diakses pada 24 Juni 2019).

Penggunaan *euro* dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu mengintegrasikan suatu mata uang tunggal antarnegara anggota, menciptakan perekonomian yang lebih fleksibel dan mudah, mengurangi resiko kerugian kurs atau nilai tukar yang berubah-ubah. Untuk melaksanakan integrasi sebesar ini, Uni Eropa memiliki Bank Sentral Eropa sebagai institusi resmi yang mengawasi sistem perekonomian khususnya keuangan di seluruh negara anggota (Salvatore, 2016: 713).

4.1.3 Krisis Ekonomi Yunani

4.1.3.1 Penyebab Krisis Yunani

Penyebab utama krisis Yunani adalah hutang negara yang terus-menerus menumpuk dan tidak seimbang terhadap pendapatan negara. Negara berada dalam keadaan krisis ketika pendapatan negara menurun drastis sebagai akibat dari krisis

global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini mengarah pada daya beli masyarakat Amerika Serikat yang menurun sangat drastis sehingga volume impor menurun dan volume ekspor negara-negara produsen yang berbisnis dengan Amerika Serikat pun menurun drastis. Karena volume ekonomi Amerika Serikat sangat besar, maka sudah tentu dampaknya kepada semua negara pengeskor di seluruh dunia juga menjadi ancaman yang serius, terutama negara-negara yang sangat mengandalkan eksportnya ke Amerika Serikat, salah satunya adalah Yunani (Simanjuntak & Wijanark, 2016 : 9-10).

4.1.3.2 Kronologi Krisis Yunani

Yunani mengalami masalah ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2008-2009 pasca terjadinya krisis global. Hutang negara terus membengkak sedangkan pendapatan negara menurun. Pada tahun 2010, pemerintah Yunani secara resmi mengajukan permohonan bantuan dari *European Commission* (EC), *European Central Bank* (ECB), dan *International Monetary Fund* (IMF). Ketiganya kemudian disebut sebagai Kreditor Troika. Pada Mei 2010, Troika memberikan *bailout* sebesar 110 milyar *euro* namun dengan syarat pemerintah Yunani harus melakukan *austerity* atau kebijakan penghematan di negaranya yang diatur oleh Uni Eropa (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani> diakses pada 15 Maret 2019).

Setelah *bailout* diberikan, Pemerintah Yunani dibawah Perdana Menteri yang menjabat saat itu, George Papandreou mengeluarkan berbagai *austerity* atau upaya penghematan dengan bentuk pemangkasan anggaran rutin tertentu. *Austerity* ini berupa pembekuan pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah, pengurangan bonus, dan pengurangan biaya lembur. Selain itu juga

austerity meliputi pembekuan pembayaran pensiun, kenaikan pajak BBM, rokok, alkohol, dan barang mewah (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

Runtuhnya perekonomian Yunani secara signifikan sangat mempengaruhi situasi politik domestik. Rakyat dikejutkan dengan *austerity* yang tiba-tiba sehingga merubah banyak hal besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian mengakibatkan banyak terjadi demonstrasi masyarakat. Tidak sedikit yang disertai kekerasan bahkan memakan korban jiwa, contohnya pada aksi bom molotov di Bank Marfin Eganatia cabang Stadiou Street yang mengakibatkan 3 orang terbunuh (<https://www.keptalkinggreece.com/2010/05/05/3-dead-at-marfin-banktragedy-crime-negligence/> diakses pada 15 Maret 2019).

Setelah diberikan *bailout* dan dilaksanakannya *austerity*, ternyata keadaan negara tidak juga membaik. Atas pertimbangan tersebut, pada 21 Februari 2012 Kreditor Troika kembali memberikan *bailout* kedua sebesar 130 milyar Euro, bahkan lebih besar dari bantuan sebelumnya karena keadaan justru semakin parah dengan hutang negara yang semakin membengkak dan *austerity* yang menambah masalah baru. *Bailout* kedua ini disertai dengan persyaratan berupa pelaksanaan seluruh program *austerity*, reformasi struktural, dan privatisasi aset pemerintah (<https://www.nytimes.com/2012/03/15/business/global/greece-gets-formal-approval-for-second-bailout.html> diakses pada 20 Maret 2019).

Keadaan politik negara terus mengalami ketidakstabilan, termasuk langkah-langkah pemerintah dalam membuat kebijakan yang seolah tidak berujung pada penyelesaian masalah. Tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun terberat sepanjang krisis ekonomi meruntuhkan Yunani, karena

hutang negara yang terus membengkak dan hutang terhadap kreditor troika juga menjadi beban baru bagi negara yang sedang bermasalah. Masyarakat diberatkan dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan kehidupan mereka sementara pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakat justru bermasalah secara internal.

Pada 30 Juni 2015, IMF mengkonfirmasi kegagalan Yunani dalam membayar cicilan hutang sebesar 1,6 milyar *euro* yang telah jatuh tempo. Yunani diberitakan sebagai negara Eropa pertama yang gagal membayar cicilan hutang karena jatuh tempo pada IMF (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150701101840-78-63507/imf-pastikan-yunani-gagal-bayar-hutang> diakses pada 21 Maret 2019).

Keadaan ini semakin memperburuk keadaan negara. Pada 19 Agustus 2015, Troika memberikan *bailout* ketiga sebesar 86 milyar Euro dengan permintaan 201 kebijakan ekonomi yang perlu dibenahi sebagai syarat utama pencairan dana (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 21 Maret 2019).

Selama Yunani berada pada program *bailout* sejak tahun 2010, hingga tahun 2018, Yunani mengalami rasio hutang yang fluktuatif. *Bailout* yang diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani dan perlahan mengurangi jumlah hutang, tetapi pada waktu tertentu juga justru meningkatkan rasio hutang negara. Hal ini karena *bailout* yang diberikan semacam siklus *gali lubang, tutup lubang*. Dana yang diberikan pada setiap *bailout* adalah untuk menutupi hutang sebelumnya sehingga cenderung berbentuk penghapusan sebelumnya, sedangkan perekonomian dalam negeri masih terus mengalami krisis berkepanjangan.

Sejak tahun 2016, dinamika keanggotaan Yunani yang bermasalah di Uni Eropa kembali membaik setelah Yunani

mulai meningkatkan pendapatan negara dan membayar cicilan hutangnya pada Troika. Masalah *austerity* yang selama ini memberatkan masyarakat juga perlahan mulai dibenah kembali dan diaplikasikan dengan penuh pertimbangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Stabilitas Ekonomi Uni Eropa Pasca Krisis Yunani 2010

Krisis Yunani mempengaruhi integrasi ekonomi di Uni Eropa, oleh karena itu polemiknya dapat bersinggungan dengan negara lain juga. Keterlibatan Yunani dalam perputaran *euro* memberikan pengaruh yang signifikan pada stabilitas ekonomi kawasan. Krisis ini mengakibatkan efek berantai yang menyebabkan pertumbuhan GDP total 19 negara *Eurozone* mengalami penurunan drastis pada tahun 2009, dan fluktuatif namun cenderung turun pada tahun-tahun berikutnya. Jerman yang merupakan kontributor pendanaan Uni Eropa yang terbesar juga mengalami angka penurunan serupa (*European Union Statistic*).

4.2.2 Dinamika Isu Grexit dari Uni Eropa

4.2.2.1 Kebijakan Upaya Penghematan (*Austerity*) dari Uni Eropa terhadap Pemerintah Yunani

Setiap Yunani mengajukan permohonan bantuan pada Troika, kedua pihak menyepakatinya dalam *Economic Adjustment Program* atau Program Penghematan Ekonomi, yaitu kesepakatan dimana Troika memberikan bantuan dana namun pemerintah Yunani harus melakukan kebijakan penghematan di negaranya yang diatur oleh Troika, khususnya Uni Eropa. Kesepakatan ini dibuat dalam suatu nota kesepahaman *Memorandum of Economic and Financial Policies* atau Nota Kebijakan Ekonomi dan Keuangan yang memuat penghematan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Yunani

(<https://www.theguardian.com/business/2010/may/18/greece-gets-first-bailout-cash> diakses pada 6 Agustus 2019).

4.2.2.2 Desakan Masyarakat Yunani Menolak *Austerity*

Ribuan masyarakat berdemo besar-besaran untuk menolak *austerity* yang telah memangkas banyak sekali anggaran sosial dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat menyuarakan pendapat bahwa yang dilakukan pemerintah telah banyak membuat kesengsaraan rakyat, karena pemerintah memotong gaji dan dana pensiun rakyat, tetapi bersamaan dengan menaikkan pajak demi membayar cicilan hutang negara (<http://liputanislam.com/berita/ribuan-warga-yunani-demo-tolak-program-austerity/> diakses pada 24 juni 2019).

Sejak 12 Juli 2015, media sosial bahkan dihebohkan dengan tagar #ThisisACoup yang menjadi *trending topic* di twitter. Hal ini merupakan upaya masyarakat menunjukkan sentimen membenci pemerintah dan Uni Eropa atas siklus *bailout-austerity* selama ini. Uni Eropa dikatakan secara sengaja telah mengekang Yunani dan menghancurkan secara perlahan (<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-crisis-twitter-denounces-new-bailout-agreement-using-thisisacoup-hashtag-10384370.html> diakses pada 18 Juli 2019).

4.2.2.3 Referendum Masyarakat Yunani terhadap Keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa

Keadaan Yunani yang diberatkan dengan demonstrasi masyarakat secara terus-menerus akibat menolak *austerity* membuat Perdana Menteri Alexis Tsipras menginisiasi referendum pada 5 Juli 2015, untuk membiarkan masyarakat memilih apakah mau menerima persyaratan yang diajukan Troika untuk mendapatkan *bailout*, atau menolak persyaratan tersebut. Apabila rakyat

memilih “iya”, maka pemerintah akan kembali menerima *bailout* dan terpaksa menjalankan program *austerity* lagi, dengan tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Jika tidak, maka keputusannya adalah Yunani keluar dari Uni Eropa dan terbebas dari *austerity*, tetapi pemerintah harus mencari cara lain untuk melunasi hutang negara.

Hasil referendum ini adalah 39 persen rakyat yang memilih Yunani menerima bantuan dan syarat yang diberikan, dan 61 persen rakyat memilih menolak menerima bantuan Uni Eropa dan menyudahi *austerity* selama ini. Namun hasil ini ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Yunani secara bersamaan berada dalam keadaan tenggang waktu pembayaran hutang yang jatuh tempo dan tidak ada jalan lain selain meminta bantuan Troika lagi, dan secara otomatis Yunani masih tetap harus berada dalam keanggotaan Uni Eropa (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

4.2.2.4 Penggunaan Drachma Jika Yunani Keluar dari Uni Eropa

Jika Yunani keluar dari Uni Eropa, maka hal ini akan mengarah pada Yunani yang secara otomatis harus meninggalkan *euro* dan besar kemungkinan kembali menggunakan *drachma*. Keputusan ini akan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Mengenalkan atau menggunakan kembali mata uang yang baru adalah suatu hal tidak mudah. Situasinya bisa saja memburuk karena masih belum bisa dipastikan apakah Yunani memiliki kapabilitas administrasi yang sesuai untuk mengganti mata uang dalam waktu yang sangat cepat, apalagi dalam keadaan negara sedang mengalami krisis sebesar itu.

Perekonomian negara juga akan dimulai lagi dari titik nol. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana membuat proses penyebaran uang yang

efektif dan efisien serta memastikan seluruh uang baru ini bisa menjangkau seluruh daerah. Transaksi perdagangan mungkin bisa terhambat juga jika banyak toko yang hanya menerima *euro* karena ragu dengan nilai *drachma*.

4.2.3 Alasan Uni Eropa Mempertahankan Yunani di Uni Eropa

4.2.3.1 Mencegah Krisis Yunani Meluas ke Negara-Negara Pengguna *Euro* (*Euro Zone*)

Krisis Yunani telah mengancam stabilitas ekonomi di Uni Eropa. Selama krisis terjadi, kurs *euro* terhadap *dollar* terus melemah. Salah satu upaya bantuan Uni Eropa ditujukan untuk menghindari terjadinya efek domino krisis ini pada negara *Eurozone* lainnya seperti Italia, Irlandia, Spanyol, dan Portugal. *Bailout* yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban Yunani, tetapi menahan negara-negara tersebut dari *collapse* ekonomi yang serupa (Kouretas, 2010 : 1).

4.2.3.2 Kewajiban Bank Sentral Eropa untuk Mengontrol Perekonomian Yunani sebagai Negara Pengguna *Euro*

Bank Sentral Eropa atau *European Central Bank* memiliki tanggungjawab dalam mengawasi masalah moneter Yunani sebagai negara anggota *eurozone* melalui *Economic Adjustment Program* (Program Penghematan Ekonomi, *European Financial Stability Facility* dan *Stability and Growth Pact* (SGP)).

SGP sendiri adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti oleh negara-negara pengguna *euro* untuk mencapai stabilitas ekonomi kawasan. SGP membatasi hutang publik setiap negara sebesar 60 persen dari GDP dan defisit anggaran sebesar 3 persen dari GDP. Dalam kasus Yunani khususnya, Bank Sentral Eropa mengontrol perekonomian Yunani secara ketat untuk membantu Yunani mengelola keuangan

sehingga bisa membayar hutang-hutangnya dan mencegah Yunani mengalami peningkatan hutang dan defisit (Vehuliza, 2011 : 60).

4.2.3.3 Menjaga Kredibilitas Uni Eropa

Dari perspektif Uni Eropa, jika Yunani dibiarkan *collapse* atau bahkan keluar dari keanggotaan Uni Eropa, ada semacam persepsi negatif bahwa hutang atau *bailout* yang sudah diberikan pada Yunani tidak akan terkontrol lagi secara langsung oleh Bank Sentral Eropa. Yunani selama menjadi anggota Uni Eropa saja telah lalai dan kesulitan untuk membayar hutangnya, apalagi jika Yunani dibiarkan keluar dari Uni Eropa.

Uni Eropa tentu tidak ingin kehilangan citranya sebagai organisasi regional terbaik di dunia, terutama dengan keberhasilan yang dicapainya dengan penyatuan mata uang tunggal sebagai tanda *full integration* atau total integrasi. Hal ini akan mengarah pada kredibilitas Uni Eropa yang dipertanyakan.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani adalah keterlibatan mereka dalam siklus *bailout-austerity* semacam ini dalam tiga kali periode pemberian *bailout* sejak tahun 2010 hingga 2018. Siklus ini merupakan negosiasi Yunani sebagai anggota dari Uni Eropa yang sedang mengalami krisis, meminta bantuan pada organisasi, mendapatkan bantuannya, dan mengikuti syarat yang harus dilakukan sebagai wujud timbal balik atas bantuan yang diberikan. Namun, Yunani sebagai pemerintah di dalam negerinya ternyata dipandang merugikan warga negaranya dengan siklus ini. Pemerintah yang berhutang, rakyat yang menjadi korban. Hal inilah yang kemudian membuat desakan *Grexit* muncul pada kisaran tahun 2015

sebagai wujud penolakan masyarakat dan meminta pemerintah keluar dari siklus merugikan ini. Hubungan Yunani dan Uni Eropa mengalami perdebatan panjang terkait bertahan atau keluar dengan segala konsekuensi pada dua pilihan ini. Meskipun referendum masyarakat Yunani menyatakan mayoritas ingin Yunani keluar dari Uni Eropa, pada praktiknya Yunani dalam perundingan Uni Eropa seolah tidak punya pilihan dan harus tetap bertahan, mengingat dana Uni Eropa dan IMF yang sudah banyak ada di Yunani, pertimbangan politik untuk tetap menjaga kredibilitas *euro* di dunia, serta pertimbangan moral untuk membantu Yunani yang sedang runtuh.

Pada tanggal 20 Agustus 2018, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras mengumumkan bahwa Yunani telah menyelesaikan *bailout* ketiga. Hal ini juga dilengkapi dengan pernyataan-pernyataan dari institusi keuangan Uni Eropa. Yunani yang terjebak dalam siklus *bailout-austerity* selama 8 tahun yang mengakibatkan kehidupan di Yunani berubah secara drastis dinyatakan telah berhasil memulihkan perekonomian negaranya sehingga program *bailout* ketiga yang diberikan pada tahun 2015 berhasil diselesaikan sesuai target yaitu pada tahun 2018. *Bailout* dinyatakan selesai adalah ketika Yunani berhasil memenuhi syarat-syarat ekonomi yang diberikan oleh Kreditor Troika, terkait pertimbangan jumlah pendapatan nasional atau GDP dan jumlah investasi asing yang meningkat, manajemen keuangan negara yang lebih baik dan tertransparansi, serta masalah-masalah domestik seperti pengangguran dan ketenagakerjaan yang mulai diselesaikan

Yunani memiliki kewajiban membayar hutang kepada Uni Eropa sejumlah 240 milyar *euro* secara akumulatif dari *bailout* pertama hingga ketiga, yang memiliki tenggat waktu pada beberapa tahun mendatang. Hal itulah yang membuat Yunani masih memiliki rasio hutang yang tinggi pada

GDP. Namun hal ini diperkirakan tidak seburuk masa krisis karena meskipun rasio hutangnya besar, tetapi Yunani memiliki pertumbuhan ekonomi yang perlahan meningkat. Selain itu, setelah 8 tahun menjalankan penghematan besar-besaran dalam negeri, pemerintah sudah memiliki pijakan atau fondasi yang lebih baik dalam mengelola keuangan negara.

Setelah melewati perundingan, Uni Eropa sepakat untuk menyelesaikan *bailout* ketiga dan menggantinya dengan program *post-bailout* hingga saat ini. Program ini merupakan pengawasan ketat oleh Bank Sentral Eropa dan pemerintah Yunani kini diperbolehkan kembali melakukan pinjaman luar negeri kepada Uni Eropa sebagai negara yang tidak dipandang krisis lagi (<https://www.bbc.com/news/business-45186511> diakses pada 6 Agustus 2019).

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah Yunani, sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan warganya dalam melaksanakan kesepakatan *bailout* karena yang paling merasakan dampak negatif dari *austerity* yang diterapkan pemerintah adalah masyarakat Yunani, serta mengurangi anggaran-anggaran yang berlebihan yang dapat menambah beban hutang negara
2. Bagi masyarakat Yunani, sebaiknya lebih taat dalam membayar pajak karena hal ini sangat mempengaruhi pendapatan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, ada beberapa aspek yang dapat dikaji lebih dalam lagi yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu terkait indeks saham *euro* pasca krisis, alokasi dana *bailout* yang diberikan, serta bagaimana hubungan perdagangan Yunani dengan negara lainnya pasca krisis.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ikbar, Yanuar. 2007. *Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama
- Mas'ood, Mochtar. 2003. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rudy, T.May. 2003. *Hubungan Internasional dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: Refika Aditama
- Salvatore, Dominick. 2016. *International Economics 12th Edition*.
- Sungkono, Chriswan. 2007. *Bisnis Internasional, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat

Karya Tulis Ilmiah :

- Kouretas. 2012. Jurnal : *The Greek Debt Crisis : Origins and Implications*
- Simanjuntak, Triesanto R & Wijanark, Tunjung. 2016. Jurnal : Masa Depan Uni Eropa setelah Krisis Yunani
- Vehuliza, I. Tengku. 2011. Skripsi : Krisis Euzrozone Kegagalan Kebijakan Moneter European Central Bank (ECB) Menjaga Stabilitas Finansial di Kawasan Eurozone

Rujukan Elektronik :

- Greece. Melalui: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 22 Maret 2019
- Greek Debt Crisis Explained. Melalui: <https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019
- Greece Debt Crisis : Twitter Denounces New Bailout Agreement Using

#ThisisACoup Hashtag. Melalui : <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-debt-crisis-twitter-denounces-new-bailout-agreement-using-thisisacoup-hashtag-10384370.html> diakses pada 18 Juli 2019.

Greece Economy – Overview. Melalui : https://www.indexmundi.com/greece/economy_overview.html diakses pada 9 Agustus 2019

Greece Gets First Bailout Cash. Melalui : <https://www.theguardian.com/business/2010/may/18/greece-gets-first-bailout-cash> diakses pada 6 Agustus 2019

Hutang Luar Negeri – Daftar Negara. Melalui: <https://id.tradingeconomics.com/country-list/external-debt> diakses pada 15 Maret 2019

IMF Pastikan Yunani Gagal Bayar Utang. Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150701101840-78-63507/imf-pastikan-yunani-gagal-bayar-utang> diakses pada 21 Maret 2019

Penjelasan Singkat Soal Krisis Yunani. Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-13463540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani> diakses pada 15 Maret 2019

Ribuan Warga Yunani Demo Tolak Program “Austerity”. Melalui : <http://liputanislam.com/berita/ribuan-warga-yunani-demo-tolak-program-austerity/> diakses pada 24 Juni 2019)

The History of European Union. Melalui : https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en diakses pada 11 Juni 2019

Which Countries Using Euro. Melalui : <https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which->

countries-use-euro_en diakses pada
24 Juni 2019

With Details Settled, a 2nd Greek Bailout Is
Formally Approved. Melalui:
[https://www.nytimes.com/2012/03/
15/business/global/greece-gets-
formal-approval-for-second-](https://www.nytimes.com/2012/03/15/business/global/greece-gets-formal-approval-for-second-)

bailout.html diakses pada 20 Maret
2019

3 Dead at Marfin Bank: Tragedy – Crime –
Negligence. Melalui:
[https://www.keptalkinggreece.com
/2010/05/05/3-dead-at-marfin-
banktragedy-crime-negligence/
diakses pada 15 Maret 2019](https://www.keptalkinggreece.com/2010/05/05/3-dead-at-marfin-banktragedy-crime-negligence/)